

EVALUASI KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEKTOR PENDIDIKAN PROVINSI DIY

Tejo Nurseto

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the performance of the education budget in the province of Yogyakarta Special Region which consists of five regions of Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, Sleman and Yogyakarta. Performance is measured from the level of school participation rate (APS), which is influenced by the ratio of education expenditure to PDRB (EDU / PDRB), PDRB per capita (Y / KAP) and the Literacy Rate (LTRC). The analysis used is panel data regression. Of the 5 and 10 cross section time series data are obtained 50 data for the purpose of estimation. The result is EDUPDRB variable has a coefficient of 2.70, the variable Y / KAP 6.26 and LTRC variable has a coefficient of 0.04. Of the three independent variables, the variable Y / KAP has the greatest influence coefficients. If the education budget rose 1 percent, enrollment rates (APS) will rise 2.70 percent, where per capita income rose 1 percent, the APS will rise 6.26 percent, when literacy rates rose 1 percent, the APS will rise 0.04 percent . From these results it can be concluded that the performance of education or level of APS is highly dependent on income per capita. It means that in order to improve the performance of local governments as well as continue to improve its education budget also increases revenue. The increase in revenue as a representation of the people's income increased disposable income to finance their children's education will also increase. As good as the awareness of the importance of higher education with AMK if it is not accompanied by the ability financially it will be useless.

Keywords: education expenditure, school participation rate (APS), income per capita

A. Pendahuluan

Dengan diimplementasikannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal maka tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah menjadi sangat besar, khususnya pada bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial

dalam pembangunan daerah dan telah menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan manajemen sektor pendidikan tingkat daerah masih terbatas. (Lewis, 2003).

Secara umum diyakini desentralisasi fiskal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini dilandasi oleh pandangan yang menyatakan kebutuhan masyarakat daerah terhadap pendidikan dan barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih baik dibandingkan bila langsung diatur oleh pemerintah pusat. Namun kecenderungan kearah tersebut tidak nampak karena hingga saat ini sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda dan DPRD) Kota dan Kabupaten di Indonesia merespon desentralisasi fiskal dengan menggenjot kenaikan PAD melalui pajak dan redistribusi tanpa diimbangi peningkatan efektifitas pengeluaran APBD. Langkah kebijakan semacam ini dapat berpengaruh buruk terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah serta kesejahteraan masyarakatnya. Mengingat kepentingan di atas, maka patut dipertanyakan hingga sejauh mana pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat menimbulkan implikasi buruk terhadap aktivitas penyelenggaraan pendidikan di daerah kota dan Kabupaten di Indonesia.

Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara terendah kedua dalam hal rasio anggaran Pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dilihat dari rasio terhadap PDB, anggaran pendidikan kita masih di bawah 2 persen dari PDB, sementara Malaysia mendekati 10 persen. Dari rasio terhadap belanja APBN kita di bawah 10 persen, sementara Malaysia di atas 20 persen. Lebih dari 80 persen anggaran pendidikan kita habis untuk gaji guru, sementara di Malaysia hanya sekitar 50 persen. Semua negara yang maju dalam hal ekonomi adalah negara-negara yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunannya. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia, maka Indonesia termasuk yang paling rendah alokasi anggaran pendidikannya. Hal itu bisa digunakan sebagai indikator kenapa kualitas sumber daya manusia kita masih rendah.

Tabel Alokasi Anggaran Pendidikan Beberapa Negara Asia

Negara	Rasio terhadap PDB (%)	Rasio Terhadap APBN (%)
Indonesia	1,4	9
Malaysia	5,2	23
Vietnam	2,8	-
Philipina	3,4	20
Thailand	5,0	22
Korea selatan	5,3	-
Jepang	7,0	-
Singapura	-	19

Sumber : Berbagai Publikasi, 2006

Bila dilihat indeks pendidikan negara Indonesia mengalami penurunan dalam pembangunan bidang pendidikan. Kondisi ini dapat kita lihat dari hasil laporan yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) setiap tahun yang berisi hasil pemantauan reguler pendidikan dunia. Kondisi beberapa negara, termasuk Indonesia dalam bidang yang terkait dengan pendidikan tergambar dalam Indeks Pembangunan Pendidikan atau EDI (Education Development Index) yang terdapat pada laporan EFA (Education For All) yang dipublikasikan dalam Global Monitoring Report 2008.

Tabel Indeks Pembangunan Pendidikan Negara Asia Tenggara

Negara	EDI/IPP	AP Pendidikan Dasar	Angka Melek Huruf	Angka Menurut Jender	Angka Bertahan
Brunei Darusalam	0,965	0,969	0,927	0,967	0,995
Malaysia	0,945	0,945	0,904	0,938	0,984
Indonesia	0,935	0,983	0,904	0,959	0,895
Vietnam	0,899	0,878	0,903	0,945	0,868
Filipina	0,893	0,944	0,926	0,955	0,749
Myanmar	0,866	0,902	0,899	0,963	0,699
Kamboja	0,807	0,989	0,736	0,871	0,631
Laos	0,750	0,837	0,714	0,820	0,630

Sumber : Education For All Global Monitoring Report, Tahun 2008.

Upaya untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan harus dilakukan secara terintegrasi baik dari sisi proses penyelenggaraan maupun pembiayaannya. (Devarajan, 2002) Oleh karena itu diperlukan dukungan semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Dalam hal dukungan finansial, pada kondisi di mana kontribusi pemerintah masih lebih kecil daripada partisipasi masyarakat maka komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dengan meningkatkan pengalokasian anggaran untuk mendukung keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun sangat diperlukan.

Pendidikan dasar gratis bagi masyarakat DIY terus menjadi perbincangan berbagai kalangan. Bagi pemerintah daerah yang menangani kependidikan masih beranggapan bahwa pendidikan tidak mungkin gratis. Dibarengi dengan berbagai argumen yang dibangun untuk mencitrakan bahwa pendidikan itu mahal dan perlu partisipasi (uang) masyarakat. Di Provinsi DIY sangat berpotensi dalam sumber daya manusia dan sumber dana, yang mengklaim diri sebagai Kota Pendidikan mestinya lebih mengutamakan warganya agar mudah mendapatkan akses pendidikan secara gratis dan bermutu. Perlu diingat bahwa, di daerah lain sudah bukan hal yang istimewa, seperti Sukoharjo, Jembrana, Banyuwangi, Natuna dan lainnya, kini telah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah gratis bagi warganya. Demikian pula pada daerah yang biaya hidup dan harga keperluan

sekolah mahal, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan pembiayaan gratis bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Jakarta. (Kompas, 12 Juni 2009)

Adanya rintisan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat membantu program pendidikan gratis atau murah. BOS adalah subsidi dari pemerintah pusat, tetapi tanggung jawab utama untuk pendidikan dasar dan menengah kewenangannya ada pada pemerintah kabupaten/kota. BOS hanya bantuan dari pemerintah pusat terhadap pembiayaan pendidikan kabupaten/kota. Semestinya pembiayaan pendidikan yang utama berasal dari pemerintah kabupaten/kota. Namun justru beberapa pemerintah kabupaten/kota yang menjadikan BOS sebagai pendapatan utama sementara anggaran daerah hanya sebagai pelengkap saja bahkan ada yang menghentikan sama sekali BOP setelah adanya BOS.

Secara umum di DIY masih menghadapi masalah akses dan pemerataan pendidikan. Masih adanya siswa putus sekolah, baik dengan alasan ekonomi maupun non ekonomi. Disamping itu, kurang meratanya kualitas pendidikan di Propinsi DIY. Pola pikir dan kemampuan profesional guru belum memuaskan seperti kaitannya dengan implementasi kurikulum baru seperti Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP). Sementara beberapa sekolah mencanangkan diri sebagai sekolah standar nasional bahkan internasional yang menurut mereka berakibat pada kenaikan biaya pendidikan. Menurut para ahli bahwa peningkatan standar ini hanya lebih berkonotasi pada peningkatan teknologi serta sarana dan prasarana saja, namun tidak menyentuh pada substansi mutu yang sesungguhnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam program pendidikannya. PDRB per kapita yang mencerminkan produktifitas penduduk yang masih kecil salah satunya disebabkan masih kurangnya kualitas sumber daya yang produktif.

Tabel Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi DIY

Keterangan	2001	2002	2003	2004	2005
PDRB adh berlaku	15.228.675	17.521.778	19.613.418	22.023.717	25.419.079
PDRB adh konstan 2000	14.055.071	14.687.284	15.360.409	16.146.444	16.911.053
Jumlah penduduk	3.164.880	3.208.656	3.253.038	3.298.033	3.343.651
PDRB per kapita adh berlaku	4.811.770	5.460.784	6.029.263	6.677.834	7.602.192
PDRB per kapita adh konstan 2000	4.440.949	4.577.395	4.721.866	4.895.780	5.057.661

Sumber: BPS, diolah .a.d.h. atas dasar harga

Dari tabel diatas, perkembangan PDRB dan PDRB perkapita cenderung naik tetapi tidak terlalu signifikan. Jika dilihat dengan menggunakan harga konstan angkanya justru cenderung tetap. Dari hal itu, menjadi wajar jika anggaran terhadap pendidikan juga tidak terlalu signifikan peningkatannya. Dari beberapa deskripsi diatas, kiranya perlu untuk mempelajari kinerja alokasi anggaran pemerintah

daerah dalam bidang pendidikan yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusianya bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pada saat ini disadari bahwa sektor pendidikan merupakan sektor yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Hal tersebut teridentifikasi dari berbagai studi menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (Ranis, 2004), (Ramirez, Ranis & Stewart, 1998), SMERU, 2004). Sebagai wujud kepedulian terhadap sektor ini, maka pemerintah meluncurkan Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu pasal menyebutkan tentang aspek alokasi anggaran dalam sektor pendidikan yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan harus dialokasikan minimal 20 % dari APBN dan APBD.

Namun dalam pelaksanaannya standar ini masih relatif sulit untuk dipenuhi tidak hanya oleh pemerintah pusat dan juga daerah karena keterbatasan anggaran yang ada. Sebagai akibat adanya keterbatasan budget yang tersedia menyebabkan kinerja sektor pendidikan mengalami pertumbuhan yang lambat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DIY khususnya dalam sektor pendidikan. Manfaat yang diharapkan adalah dengan mengetahui kinerja anggaran dalam sektor pendidikan, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan koreksi terhadap pengeluaran dan program dalam bidang pendidikan.

Setelah berlakunya otonomi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan salah satu sorotan utama oleh masyarakat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah masing-masing. Apakah penyusunan dan realisasi APBD tersebut sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Pertanyaan tersebut muncul ketika semakin banyaknya kasus korupsi Dana APBD di berbagai daerah di Indonesia.

Secara teoritis APBD mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas. Dalam fungsi alokasi ini, APBD memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya juga dalam rangka pelayanan publik. Dalam fungsi yang lain termasuk pula pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (fungsi distribusi) serta penciptaan lingkungan makroekonomi yang kondusif (fungsi stabilisasi). Fungsi-fungsi dasar tersebut kemudian melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, pembiayaan maupun belanja negara.

Namun seringkali fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan secara semestinya, banyak sekali terjadi disorientasi APBD. Apalagi kalau sudah berbicara yang namanya Anggaran Belanja Daerah, banyak sekali kasus-kasus penggelembungan anggaran dana yang berpotensi untuk dikorupsi.

Untuk menjawab permasalahan diatas sebaiknya kita mengetahui dulu pengertian anggaran (budget), karakteristik anggaran, serta anggaran pendidikan dalam kacamata UUD 1945 dan UU Sisdiknas 2003. Anggaran (budget) adalah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Kalau dalam dunia pendidikan, lembaga yang dimaksud adalah Sekolah. Anggaran pada hakikatnya adalah pendapatan dan belanja suatu program yang berkaitan dengan sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran uang.

Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Biasanya, dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan, pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumber lain. Besarnya biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan skala prioritas. Pemerintah membantu sekolah secara finansial dalam beberapa cara, misalnya:

1. Memberikan dana hibah untuk sekolah
2. Membayar gaji guru
3. Membantu proyek pencarian dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli, bahan, dan peralatan.
4. Membiayai proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah untuk daerah tertentu.

Besarnya penerimaan dari masyarakat baik dari perorangan maupun lembaga, yayasan, berupa uang tunai, barang, hadiah, atau pinjaman bergantung pada kemampuan masyarakat setempat dalam memajukan dunia pendidikan. Besarnya dana yang diterima dari orang tua siswa berupa iuran BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) dan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang langsung diterima sekolah didasarkan atas kemampuan orang tua siswa dan ditentukan oleh pemerintah atau yayasan. Sedangkan besarnya penerimaan dari sumber-sumber lain termasuk dalam golongan ini bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan, seperti bantuan UNICEF atau UNESCO.

Sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari alokasi biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Dari seluruh penerimaan biaya, sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, ketatausahaan., sarana prasarana pendidikan; dan sebagian diberikan kepada sekolah melalui beberapa saluran.

Pimpinan Pendidikan (kepala sekolah) harus memiliki jiwa manajer yang baik dalam mengatur anggaran sekolah, antara pemasukan dan pengeluaran harus direncanakan secara baik dan matang. Perencanaan anggaran harus dilakukan bersama-sama antara pimpinan (kepala sekolah) beserta para guru, karyawan, komite sekolah maupun orang tua siswa. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan lebih transparan dan semua pihak terlibat langsung dan mengetahui keadaan sekolah yang sebenarnya.

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan publik. (Harefa, 2008) Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis.

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (*overspending*). Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah dalam hal ini Depdiknas sebagai pengguna anggaran akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan *internal cost awareness*, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan *cost minded* dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolok ukur sebagai standar kinerja. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

Dengan demikian anggaran kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Kata anggaran diikuti kata kinerja secara etimologi bahasa tidak sulit untuk mengartikan bahwa penganggaran kinerja mencoba untuk mengkaitkan anggaran dengan pencapaian kinerja pada setiap elemen anggaran yang dikeluarkan. Dalam dunia bisnis sudah tidak asing lagi mendengar istilah anggaran/budget, tapi kadang-kadang masih ada sebagian pelaku bisnis yang mempunyai anggapan bahwa anggaran adalah sesuatu yang harus dihabiskan.

Dengan demikian anggaran kinerja mengandung pesan yang sangat mendalam yaitu penyusunan anggaran yang menitikberatkan pada sistem pengendalian manajemen. Dengan demikian, keberhasilan suatu budget actions plan tidak hanya berhenti pada ketaatan realisasi terhadap rencana, tetapi yang lebih penting adalah hasil dan implikasi kinerja yang diharapkan dari pengeluaran anggaran tersebut.

Hasil yang diharapkan dari pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang merupakan investasi kinerjanya dapat dilihat dari makin tingginya tingkat pendidikan oleh masyarakat. Hasil studi di 98 negara yang dilakukan Psacharopoulos and Patrinos (2002) menunjukkan bahwa 'return of education investment' untuk tingkat pendidikan dasar, baik terhadap 'private benefit' maupun 'social benefit', menunjukkan rate of return paling tinggi. Makin tinggi tingkat pendidikan makin tinggi 'private benefit' nya, namun seiring dengan makin tingginya tingkat pendidikan tersebut 'social benefit' nya cenderung menurun.

Namun, yang lebih penting bagaimana faktor keberlanjutan (sustainability) dalam perbaikan sistem pendidikan kelihatannya sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Untuk mengukur keberhasilan investasi sumber daya manusia (indikator hasil) dapat dilihat dari pengetahuan umum, pengetahuan khusus, ketrampilan, serta tingkat pendidikan masyarakat.

Kuantitas sumber daya manusia akan ditentukan oleh sejumlah faktor yang merupakan indikator masukan yang mencakup kualitas dan aksesibilitas terhadap sistem pendidikan. Indikator masukan untuk pendidikan merupakan total sumber daya yang diberikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Center for the Study of Living Standards, 2001). Dengan demikian adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan memiliki relevansi yang jelas dengan kebutuhan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Terbukanya akses pada jenjang pendidikan dasar khususnya menjadi hak azasi manusia yang sangat mendasar dan tidak dapat ditawar lagi.

Pendidikan, adalah salah satu hak dasar dari masyarakat yang harus dipenuhi. Adanya program kompensasi BBM, menjadi harapan bagi siswa yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dapat melanjutkan sekolahnya. Daerah Istimewa

Yogyakarta, yang mendapat label kota pelajar, kota pendidikan, ternyata masih banyak menyimpan persoalan yang berkaitan dengan pendidikan. Gedung sekolah yang hampir roboh, guru yang jarang datang, buku-buku pelajaran yang mahal, merupakan beberapa persoalan yang harus segera ditindaklanjuti. Bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar di bidang pendidikan, dapat dilihat dari besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan. Tabel berikut memperlihatkan berapa alokasi anggaran pendidikan dari masing-masing daerah di Kabupaten/Kota DIY pada tahun 2006

Tabel Rasio belanja pendidikan terhadap total belanja APBD tahun 2006

Wilayah	Total Anggaran Pendidikan (000)	Rasio terhadap belanja APBD	Belanja non kedinasan	Rasio belanja non kedinasan terhadap belanja APBD
Bantul	265,801,329	44.79%	29,764,765	5.02%
Gunungkidul	155,799,316	30.02%	22,841,672	4.40%
Kulonprogo	110,520,344	23.41%	30,032,862	6.36%
Sleman	308,562,732	51.29%	26,517,147	4.78%
Kota	175,801,734	34.77%	18,625,788	3.68%

Ket: Penghitungan belanja non kedinasan adalah belanja public di luar belanja administrasi umum (belanja operasional dan pemeliharaan ditambah belanja modal)

Jika mengacu pada UU Sisdiknas No 20 tahun 2003, dimana merekomendasikan 20% dari APBD untuk belanja pendidikan non kedinasan, tabel tersebut menunjukkan pengingkaran terhadap undang undang ini di semua daerah. Diantara kelima daerah, tidak ada satupun daerah yang memenuhi anggaran 20% untuk belanja non kedinasan.

Seiring dengan program kompensasi kenaikan BBM oleh pemerintah, bidang pendidikan juga memperoleh bagian dana kompensasi BBM. Salah satu pemanfaatan dana kompensasi tersebut digunakan untuk para siswa yang mengalami putus sekolah. Siswa yang mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dengan diberikan beasiswa. Berdasarkan data di Dinas Pendidikan Prop. DIY tahun 2004, siswa yang memperoleh dana kompensasi kenaikan BBM terdiri atas 60.853 siswa SD, 34.946 siswa SMP, dan 15.341 siswa SMA dan SMK. Dana kompensasi untuk siswa DIY secara keseluruhan mencapai Rp.20,29 milyar.

Meskipun tingkat kelulusan atau purnanya sekolah yang termasuk sangat tinggi, akan tetapi masih terdapat angka putus sekolah yang meskipun kecil yaitu kurang dari 1 persen hal tersebut menandakan masih adanya warga masyarakat yang belum memperoleh hak mendapatkan pendidikan karena sesuatu halangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis kuantitatif dan diperjelas dengan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud mengungkapkan suatu masalah yang ada pada masa sekarang, dalam hubungannya dengan kondisi waktu yang terus berjalan secara berkesinambungan (Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994:117). Permasalahan tersebut diungkapkan urutan atau perkembangannya selama jangka waktu tertentu berdasar fakta dan data yang faktual. Metode deskriptif juga menyelidiki kedudukan atau status fenomena dan melihat hubungan antar satu faktor dengan faktor yang lain (Moh. Natsir, 1988:63). Sedangkan bersifat kuantitatif karena dalam penelitian menggunakan data statistik serta melakukan analisis kuantitatif melalui proses regresi dalam model ekonometriknya.

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis pengeluaran pendidikan, pendapatan per kapita dan angka melek huruf terhadap kinerja sektor pendidikan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan pengumpulannya oleh peneliti, namun diperoleh dari sumber-sumber luar, baik yang diterbitkan (dipublikasikan) maupun yang tidak diterbitkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data tersebut bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber lainnya yang dapat diandalkan kesahihannya. Data yang diperlukan meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai ukuran atau indikator kinerja, pengeluaran pendidikan (anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan perkapita dan Angka Melek Huruf (literacy rate). Adapun data merupakan data semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY.

Untuk menganalisis dampak belanja pemerintah terhadap pencapaian kinerja sektor pendidikan di DIY, model analisis yang digunakan direfleksikan dalam bentuk hubungan matematis sebagai berikut:

$$Y_i = f(X_i, Z_i)$$

dimana: Y adalah indikator sosial yang menunjukkan kinerja sektor pendidikan di kabupaten/kota i sebagai fungsi dari rasio pengeluaran pembangunan untuk sektor pendidikan dengan PDRB (X_i), dan vektor variabel sosial ekonomi (Z_i) yang diperlakukan sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hubungan matematis tersebut, model untuk bidang pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PERF_{it} = \beta_0 + \beta_1 (EDU/PDRB)_{it} + \beta_2 Y/Kap_{it} + \beta_3 LTRC_{it} + \varepsilon_i$$

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini digunakan Fixed effect regression untuk mengetahui kondisi masing-masing daerah jika diperlukan. Kondisi tiap daerah berbeda, bahkan kondisi daerah pada suatu waktu tertentu akan berbeda dengan kondisi daerah tersebut pada waktu yang lain. Oleh karena itu diperlukan model yang dapat menunjukkan perbedaan konstan antar daerah, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model inilah yang disebut model fixed effect. Program yang digunakan untuk mengolah data yaitu Eviews4.

Tabel Statistik Deskriptif (Ukuran Nilai Sentral)

	PERF	EDUPDRB	YKAP	LTRC
Mean	96.59060	0.805400	5686.400	82.50000
Median	96.42000	0.840000	5140.000	83.00000
Maximum	98.27000	0.990000	8640.000	92.00000
Minimum	95.33000	0.350000	4400.000	75.00000
Std. Dev	0.808403	0.172215	1250.071	3.996172
Skewness	0.336963	-0.906257	1.063943	0.402187
Kurtosis	2.484653	3.005095	2.773657	2.360267
Jarque-Bera	1.499498	6.844233	9.539850	2.200573
Probability	0.472485	0.032643	0.008481	0.332776
Observation	50	50	50	50

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa rata-rata angka partisipasi sekolah (APS) di DIY adalah 96,59. Artinya masih ada masyarakat yang belum bisa mengenyam pendidikan sekolah dasar dan menengah. Sedangkan APS tertinggi adalah 98,27 dan tertendah 95,33. Interval tersebut cukup pendek jika dibandingkan dengan APS di Indonesia secara keseluruhan. Rasio anggaran pendidikan terhadap PDRB cukup tinggi untuk ukuran di Indonesia karena sudah diatas yang ditetapkan oleh UNESCO yaitu sebesar 6% dari PDRB. Rata-rata rasio anggaran pendidikan terhadap PDRB sebesar 8%, tetapi apabila dibandingkan terhadap APBD tergolong cukup tinggi sebesar 30-40%. Untuk variabel pendapatan perkapita masih rendah rata-rata 5 juta pertahun. Variabel angka melek huruf tinggi di Provinsi DIY sudah tinggi dengan rata-rata 82,5%.

Hasil Uji Akar Unit dan Derajat Integrasi

Tabel Uji Stasioneritas Data

Nama Variabel	Nilai ADF	Nilai Kritis	Keterangan
PERF	-6.784199*	-4.1584	Stasioner
EDU/PDRB	-3.749002**	-3.5045	Stasioner
Y/KAP	-3.486254***	-3.1816	Stasioner
LTRC	-4.174741*	-4.1584	Stasioner

*Stasioner pada α 1%

**Stasioner pada α 5%

***Stasioner pada α 10%

Pada tabel 4.2 diatas ditunjukkan semua data sudah stasioner pada tingkat aras hanya pada perbedaan derajat kesalahannya. Variabel perf sudah stasioner pada alfa 1%, EDU/PDRB pada alfa 5%, Y/KAP pada alfa 10% dan LTRC pada alfa 1%. Perbedaan tingkat stasioneritas tadi tidak mempengaruhi analisis karena jika menggunakan alfa 10% maka otomatis semua variabel akan stasioner pada tingkat aras/level.

Akan tetapi untuk lebih meningkatkan kualitas estimasi akan lebih baik jika dilakukan uji derajat integrasi. Uji derajat integrasi ini pada dasarnya adalah turunan pertama dari semua variabel penelitian.

Tabel Uji Derajat Integrasi

Nama Variabel	Nilai ADF	Nilai Kritis	Keterangan
PERF	-6.993450*	-4.1630	Stasioner
EDU/PDRB	-5.615786*	-4.1630	Stasioner
Y/KAP	-4.667678*	-4.1630	Stasioner
LTRC	-6.188496*	-4.1630	Stasioner

*Stasioner pada α 1%

*Stasioner pada α 5%

*Stasioner pada α 10%

Setelah dilakukan uji derajat integrasi maka semua variabel sudah stasioner pada derajat kepercayaan 99% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.3. oleh karena itu model yang digunakan dalam penelitian ini sudah baik.

Tabel Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Dependent Variable: PERF?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 10/11/10 Time: 09:35
 Sample: 2000 2009
 Included observations: 10
 Number of cross-sections used: 5
 Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
EDUPDRB?	1.431641	0.530896	2.696650	0.0100
YKAP?	6.26E-05	8.98E-05	0.696651	0.4899
LTRC?	0.042762	0.037774	1.132028	0.2640
Fixed Effects				
_B--C	98.99549			
_G--C	99.36485			
_K--C	99.50855			
_S--C	99.45943			
_Y--C	99.27801			
R-squared	0.077901	Mean dependent var	96.59060	
Adjusted R-squared	-0.075782	S.D. dependent var	0.808403	
S.E. of regression	0.838475	Sum squared resid	29.52772	
Log likelihood	-57.77959	F-statistic	11.774123	
Durbin-Watson stat	1.882009	Prob(F-statistic)	0.182108	

Dari tabel diatas dapat diambil beberapa nilai terpenting yang dijadikan analisis dalam penelitian ini, dari ketiga variabel independen hanya EDU/PDRB yang mempunyai nilai t signifikan. Semua koefisien tanda dalam data panel tersebut sudah sesuai dengan teori.

Tabel Koefisien Regresi Data Panel

Keterangan	Fixed Effect	t-statistics
Variabel dependen	PERF	
EDU/PDRB	1,431641	2,696650
Y/KAP	6,260005	0,696651
LTRC	0,042762	1,132028
F-Stat	11,774123	
R²	0,077901	
DW-Stat	1,882009	
N	50	

Pada tabel hasil regresi menggunakan data panel menunjukkan masing masing koefisien variabel penelitian dan nilai t statistiknya. Dari ketiga variabel mempunyai nilai t yang signifikan dan tidak. Variabel EDU/PDRB sebagai variabel utama untuk mengetahui kinerja anggaran pendidikan menunjukkan nilai uji t yang signifikan, sedangkan variabel Y/KAP dan LTRC tidak signifikan. Akan tetapi uji tanda menunjukkan hasil yang diharapkan sesuai dengan teori. Dari tabel diatas dapat diringkas menjadi model penelitian sebagai berikut:

$$\text{PERF} = 1,43\text{EDUPDRB} + 6,26\text{YKAP} + 0,04\text{LTRC}$$

(2,69665) (0,696651) (1,132028)

Dalam penelitian ini kinerja pendidikan diasumsikan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang diwakili dengan variabel performance (PERF) dipengaruhi oleh rasio pengeluaran pendidikan terhadap PDRB, PDRB perkapita dan angka melek huruf. Variabel EDUPDRB mempengaruhi kinerja sebesar 1,43%. PDRB perkapita terhadap kinerja pendidikan adalah 6,26% sedangkan literacy rate 0,04%. Dari ketiga variabel tersebut variabel PDRB perkapita mempunyai pengaruh atau peran yang terbesar. Hal ini bisa dijelaskan bahwa ketika anggaran pemerintah masih terbatas, biaya pendidikan masih banyak yang harus ditanggung oleh masyarakat, maka faktor pendapatan masyarakat menjadi penting. Ketika pendapatan naik, maka kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya juga semakin meningkat, oleh karena itu variabel ini mempunyai koefisien yang terbesar. Variabel PDRB perkapita mempunyai koefisien pengaruh 6,26. Jika PDRB perkapita naik 1% maka kinerja (APS) akan naik sekitar 6 persen.

Sedangkan variabel literacy rate atau angka melek huruf memiliki koefisien pengaruh yang paling kecil yaitu 0,04%, hal ini dapat dijelaskan bahwa kemampuan baca tulis orang tua tidak terlalu memberikan pengaruh dalam usahanya memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya.

D. Analisis dan Pembahasan

Pendidikan merupakan indikator utama pembangunan dan kualitas SDM suatu bangsa. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya peningkatan sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa keunggulan suatu bangsa dalam berbagai bidang, tidak semata-mata tergantung pada keunggulan sumber daya alam yang dimilikinya, melainkan oleh keunggulan kualitas sumber daya manusianya yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang unggul itu. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, diharapkan akan semakin baik kualitas sumber daya manusianya.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengaplikasikan keinginan tersebut. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Namun demikian pendidikan adalah suatu investasi jangka panjang yang tidak mampu menghasilkan dan berdampak seketika. Proses pendidikan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat besar.

Salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah adalah angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah ini merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk dalam proses kegiatan pendidikan formal. Dalam upaya melihat pengaruh faktor ekonomi masyarakat terhadap partisipasi sekolah penduduk, maka dilakukan analisis keterkaitan antara angka partisipasi sekolah dengan tingkat pendapatan rumah tangga, yang dalam hal ini diukur melalui PDRB per kapita. Disamping itu juga dipengaruhi oleh alokasi anggaran pemerintah dalam bidang pendidikan. Jika alokasi anggaran cukup besar, maka biaya pendidikan menjadi lebih murah karena subsidi yang cukup sehingga pendidikan menjadi terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Angka partisipasi sekolah menjadi semakin lebih besar.

Tabel PDRB DIY 2004

TAHUN	PDRB (ADH Berlaku) jutaan
2000	14.023.873,78
2001	15.228.675,98
2002	17.521.778,33
2003	19.613.418,78
2004	22.023.880,34
2005	25.337.603,43
2006	29.417.348,99
2007	32.916.736,41
2008	38.102.132,68
2009	41.437.750,34

Apabila kita perhatikan pertumbuhan PDRB DIY laju pertumbuhannya relatif kecil sekitar 10% saja, sedangkan pertumbuhan anggaran pendidikan relatif stagnan menyebabkan rasio pengeluaran pendidikan terhadap PDRB seakan akan meningkat. Padahal hal itu tidak terlalu tepat. Sedangkan pertumbuhan penduduknya lebih tinggi, sehingga secara riil kenaikan PDRB perkapita lebih kecil lagi. Padahal variabel ini mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan tingkat partisipasi sekolah. Pemerintah terbatas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, sehingga pemerintah dapat membuat terobosan dengan meningkatkan PDRB dan tingkat perekonomian masyarakat.

Tabel Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2005

No	Wilayah	Adh berlaku	Adh konstan 2000
1	Bantul	5,676.00	3,748.00
2	Kulonprogo	5,550.00	3,921.00
3	Gunungkidul	5,654.00	4,000.00
4	Sleman	7,746.00	5,131.00
5	Kota Yogyakarta	15,555.00	10,109.00
6	Provinsi DIY	7,551.00	5,066.00

PDRB perkapita di daerah kabupaten baik Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul maupun Sleman termasuk rendah. Sedangkan Kota Yogyakarta termasuk tinggi. Dengan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan (PDRB) per kapita, misalnya, agaknya sudah terjadi perubahan struktural di DIY sejak krisis ekonomi 1997 (lihat Tabel 4.8). Selama 1997-2000, rata-rata kabupaten/kota di DIY mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi 3,11%, dengan rata-rata PDRB per kapita Rp 1,66 juta. Setelah otonomi daerah bergulir, tahun 2001-2003, ternyata kabupaten/kota di DIY mulai tumbuh positif, dengan rata-rata 3,16, dan PDRB per kapita pun meningkat menjadi hampir Rp 1,8 juta. Secara statistik, terbukti telah terjadi perubahan struktural yang cukup signifikan dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah, meski tidak signifikan untuk PDRB per kapita.

Tabel Rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita

	1997-2000		2001-2003	
	Pertumbuhan Ekonomi (%)*	PDRB per Kapita (Rp) **	Pertumbuhan Ekonomi (%)*	PDRB per Kapita (Rp)**
Jogjakarta	-2,67	3.310.478	3,37	3.679.107
Sleman	-1,17	1.588.300	4,16	1.700.146
KulonProgo	-8,53	973.190	2,60	999.686
Bantul	-2,01	1.068.987	3,59	1.132.711
GunungKidul	-1,17	1.359.180	2,09	1.439.210
Rata-rata DIY	-3,11	1.660.027	3,16	1.790.172

Sumber: Mudrajat Kuncoro,2007.

Tabel Angka Partisipasi Sekolah

	7-12	13-15	16-18	19-24
2003	98,67	95,10	73,58	42,29
2004	98,77	95,02	75,96	47,00
2005	99,05	95,16	74,86	41,21
2006	99,35	90,55	71,18	39,71
2007	99,29	92,62	71,82	43,38
2008	99,62	92,91	72,46	43,47
2009	99,65	93,42	72,26	43,3

Dalam tabel diatas, tingkat partisipasi sekolah sampai usia 15 atau masih dalam tahapan program pendidikan dasar tergolong sangat tinggi. Artinya penduduk di Provinsi DIY sebagian besar sudah mengenyam sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk pendidikan tangga (usia 19-24) kurang dari 50%, hal itu disebabkan pendidikan tinggi bukan tanggung jawab pemerintah daerah dalam program pendidikan sehingga dengan biaya yang relatif tinggi belum semua masyarakat dapat mengenyam pendidikan tinggi.

Tabel Angka melek Huruf/Literacy Rate

No	Wilayah	2003		2004		2005		2006		2007	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Prov. DIY	91.34	80.37	91.92	79.90	92.53	81.20	92.7	81.6	94.3	82.2
2	Kulon Progo	92.70	78.28	94.02	79.27	94.74	79.72	94.9	80.2	95.0	83.4
3	Bantul	90.33	78.93	91.40	80.15	93.19	81.15	93.4	81.2	95.9	81.5
4	Gunung Kidul	82.08	65.42	82.53	65.14	83.05	66.93	94.5	67.5	84.7	67.8
5	Sleman	94.80	86.91	95.27	84.13	94.94	86.25	95.1	86.8	96.9	87.2
6	Kota Yogyakarta	98.98	95.56	98.52	95.05	98.68	94.11	99.0	94.1	99.7	95.5

Secara umum tingkat melek huruf penduduk DIY sangat baik, lebih dari 90% penduduk di DIY telah bebas dari buta huruf. Hanya Gunungkidul yang masih sedikit dibawah 90%. Keadaan tersebut dapat dibaca dengan tingkat melek huruf yang tinggi semestinya kesadaran akan pendidikan juga tinggi. Akan tetapi hal itu juga harus didukung dengan kemampuan secara finansial atau pendapatan.

Sehingga dalam penelitian ini variabel angka melek huruf sangat kecil pengaruhnya. Meskipun positif, artinya ada keterkaitan antara melek huruf dengan pendidikan tetapi tidak dominan.

E. Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian seperti terangkum dalam bab empat diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel EDU/PDRB yaitu rasio anggaran pendidikan terhadap Produk Dometik Bruto mempunyai nilai koefisien 1,43 dengan nilai uji t sebesar 2,69665. Artinya positif dan signifikan, hal itu menunjukkan uji tanda yang tepat dan signifikan. Apabila anggaran pendidikan naik 1 persen maka kinerja pendidikan (APS) akan naik 1,43 persen. Angka ini termasuk cukup kecil sebagai upaya untuk mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah dipengaruhi oleh anggaran pendidikan pemerintah secara kecil. Hal tersebut karena meskipun anggaran pendidikan ditingkatkan namun biaya yang ditanggung oleh masyarakat masih tinggi.
2. Variabel PDRB/KAP yaitu produk domestik regional bruto atau pendapatan perkapita mempunyai nilai koefisien yang paling besar diantara ketiga variabel independen sebesar 6,26 dengan nilai uji t statistik sebesar 0,696651. Artinya positif dan tidak signifikan, hal itu menunjukkan baik tanda maupun nilai t sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja pendidikan (APS) paling banyak dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, apabila pendapatan perkapita naik 1 persen maka tingkat partisipasi sekolah naik 6,26 persen. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan karena di Indonesia biaya pendidikan sebagian besar masih ditanggung masyarakat, maka yang bisa meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan adalah pendapatan perkapita. Pendapatan masyarakat sendiri yang dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah.
3. Variabel LTRC yaitu angka melek huruf mempunyai nilai koefisien 0,04 dan nilai uji t statistik sebesar 1,132028. Artinya positif dan tidak signifikan, yang menunjukkan uji tanda sesuai dengan yang diharapkan. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tingkat melek huruf masyarakat sangat kecil pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi sekolah sekitar 0,04 persen. Meskipun tingkat melek huruf masyarakat tinggi, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan kemampuan secara finansial maka tidak akan banyak mempengaruhi kinerja pendidikan. Apalagi masyarakat Provinsi DIY mempunyai nilai angka melek huruf yang cukup tinggi, diatas rata-rata nasional sehingga variabel pendapatan perkapita menjadi variabel yang paling berpengaruh dan menentukan.

Saran

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anggaran pendidikan mempunyai nilai dan pengaruh yang lebih kecil daripada pendapatan perkapita. Oleh karena itu, disamping meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY, pemerintah Provinsi DIY seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya sehingga dapat meningkatkan PDRB. Tingginya PDRB sebagai representasi kekuatan ekonomi daerah pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perkapita. Naiknya pendapatan perkapita akan meningkatkan kekuatan masyarakat dalam meningkatkan tingkat partisipasi sekolahnya.

Naiknya anggaran pendidikan sebagai subsidi dan membiayai biaya operasional sekolah memang akan mengurangi beban masyarakat, akan tetapi biaya tidak langsung dan biaya penunjang pendidikan yang juga masih banyak di tanggung masyarakat menyebabkan naiknya anggaran pendidikan tidak menyebabkan naiknya angka partisipasi sekolah secara langsung.

Daftar Pustaka

- Biro Pusat Statistik (BPS), berbagai edisi.
- Devarajan, S. Dan S. Vinaya. (1993). What do Government Buy? The Composition of Public Spending and Economic Performance, *Policy Research Working Paper*, The World Bank. 1082.
- Eric A. Hanushek, Ludger Wobmann. (2007). *Education Quality and Economic Growth*, The World Bank, Washington, DC
- Fery Andrianus. (2004). Analisis pengeluaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (1970-2000), *Jurnal Kompetensi*, UCY.
- Hartono, Djoko dan David Ehrmann. (2003). *The Indonesian Economics Crise, Impact on School Enrollment and Funding*, in *The Indonesian Crises: A Human Development Perspective*, diedit oleh Aris Anants, Singapura, ISEAS.
- Lewis, Blane D. (2003). *Minimum Service Delivery Standard For Decentralized Education Function: Fiscal Need, Financing Option and Policy Implication*, Research Triangle Institute International.
- Mandala Harefa. (2008). *Kebijakan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan: Antara Keinginan dan Keterbatasan*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Noeroso L. Wahyudi. (2007). Dampak Sosial Ekonomi dan Evaluasi Belanja Daerah dan Proyek Pembangunan Studi Kasus: Sektor Pendidikan, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Badan Kebijakan Fiskal Depkeu, Jakarta.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi DIY, berbagai edisi.
- Psacharopoulos George and Harry Anthony Patrinos. (2002). Return to Investment in Education : A Further Update. World Bank policy Research *Working Paper* 2881. Whashington DC, USA.
- Ranis, G, Stewart, F and Ramirez, A. (2004). Economic growth and Human Development. *World Development* vol.28 No.2.